

---

## **PERAN AUDIT INTERNAL (APIP) DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA**

**Farhan Hilal<sup>(1)</sup>, Regita Aulia Indy Irawan<sup>(2)</sup>, Irma wati<sup>(3)</sup>, Nurhaliza<sup>(4)</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Bisnis Prodi Manajemen Keuangan Sektor Publik , Politeknik Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe

e-mail: [farhan.hillal03@gmail.com](mailto:farhan.hillal03@gmail.com), [regitaauliaindy@gmail.com](mailto:regitaauliaindy@gmail.com), [irmareal2003@gmail.com](mailto:irmareal2003@gmail.com),  
[liza.nur04@gmail.com](mailto:liza.nur04@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Corruption is one of the major challenges in governance in Indonesia, negatively impacting economic, social, and political stability. The Internal Government Oversight Apparatus (APIP) plays a strategic role as an internal auditor in preventing and detecting corruption, particularly at the local government level. This study aims to analyze the effectiveness of APIP's role in oversight and corruption prevention, identify the institutional challenges faced, and formulate strategies to strengthen APIP's capacity. Using a qualitative approach, this study evaluates the Internal Control System (SPI), independence, and competence of internal auditors. The research findings indicate that an optimal role for APIP requires an increase in independence, strong management support, and the development of human resource competencies through training and certification. The study recommends strengthening institutional frameworks, utilizing oversight technology, and increasing collaboration with law enforcement agencies to create a cleaner, more transparent, and accountable government.*

**Keywords :** *Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), Internal Control System (SPI), Corruption*

### **ABSTRAK**

Korupsi merupakan tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia yang berdampak negatif pada stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis sebagai auditor internal dalam mencegah dan mendeteksi tindak korupsi, khususnya di tingkat pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi, mengidentifikasi kendala kelembagaan yang dihadapi, serta merumuskan strategi penguatan kapasitas APIP. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI), independensi, serta kompetensi auditor internal di instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk memastikan peran APIP yang optimal, diperlukan peningkatan independensi dalam pengawasan, dukungan manajemen yang kuat, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi pengawasan, dan peningkatan kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

**Kata kunci:** Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Sistem Pengendalian Intern (SPI), Korupsi

## **1. Pendahuluan**

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik negara. Menurut laporan Transparency International dalam Corruption Perceptions Index 2023, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi korupsi, dengan skor yang menunjukkan perlunya penguatan tata kelola pemerintahan. Dalam upaya pencegahan dan deteksi korupsi, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peran strategis sebagai pengawas internal yang bertanggung jawab untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintahan, terutama di tingkat daerah (PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP).

Meskipun memiliki peran penting, APIP masih menghadapi berbagai kendala kelembagaan yang menghambat optimalisasi tugasnya. Kendala ini meliputi keterbatasan independensi, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, dan minimnya dukungan manajerial (KPK, 2023). Kondisi ini memerlukan perhatian lebih untuk memperkuat kapasitas kelembagaan APIP, yang melibatkan peningkatan independensi, pengembangan kompetensi profesional, dan pemanfaatan teknologi modern untuk pengawasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI), independensi auditor, dan kompetensi sumber daya manusia. Temuan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas APIP dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sebagai rekomendasi, kajian ini menekankan pentingnya dukungan teknologi serta kerjasama lintas sektor untuk mendukung reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Audit internal merupakan elemen penting dalam pengelolaan organisasi yang

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas operasional dan memastikan kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA) pada tahun 2019, audit internal tidak hanya berfokus pada audit keuangan, tetapi juga pada penilaian risiko dan tata kelola organisasi secara keseluruhan. Auditor internal diharapkan untuk memberikan jaminan dan konsultasi yang independen serta objektif untuk meningkatkan efisiensi operasional, efektivitas pengendalian, dan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi. Dengan demikian, tujuan utama audit internal adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara yang efisien, serta meminimalisir risiko yang dapat menghambat operasional dan mencapai tata kelola yang baik.

Teori mengenai kecurangan atau fraud yang berkembang pada tahun 2019 banyak dipengaruhi oleh Teori Fraud Triangle yang pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1950-an, namun mengalami penyempurnaan dalam beberapa dekade terakhir. Menurut Zahra et al. (2019), fraud terjadi karena adanya kombinasi antara tiga faktor utama: tekanan atau motivasi, peluang, dan rasionalisasi. Penelitian ini menekankan bahwa dalam konteks organisasi modern, tekanan dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti tekanan untuk mencapai target kinerja atau masalah pribadi.

Peluang untuk melakukan fraud lebih besar apabila ada kelemahan dalam sistem pengendalian internal atau kurangnya pengawasan. Rasionalisasi, di sisi lain, terjadi ketika individu membenarkan tindakan fraud karena merasa bahwa hal tersebut tidak akan merugikan organisasi atau mereka percaya bahwa itu adalah jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal dan budaya organisasi yang mendukung integritas sangat penting untuk memitigasi faktor-faktor yang memicu terjadinya fraud.

Dalam konteks pengawasan internal pemerintah, Peraturan MenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2009 dan berbagai kajian yang berkembang setelahnya menekankan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran dan kebijakan pemerintah dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Berdasarkan Situmorang dan Marpaung (2019), APIP memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di sektor publik. Dengan melakukan audit, evaluasi, dan pemantauan yang cermat terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah, APIP dapat memberikan jaminan kepada pimpinan bahwa tata kelola pemerintahan telah berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Sebagai pengawas internal yang independen, APIP bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan anggaran atau kebijakan serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah diimplementasikan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Audit internal merupakan elemen penting dalam pengelolaan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas operasional dan memastikan kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA) pada tahun 2019, audit internal tidak hanya berfokus pada audit keuangan, tetapi juga pada penilaian risiko dan tata kelola organisasi secara keseluruhan. Auditor internal diharapkan untuk memberikan jaminan dan konsultasi yang independen serta objektif untuk meningkatkan efisiensi operasional, efektivitas pengendalian, dan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi. Dengan demikian, tujuan utama audit

internal adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara yang efisien, serta meminimalisir risiko yang dapat menghambat operasional dan mencapai tata kelola yang baik.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis deduktif (Rahmat, 2015) untuk menggali proses dan makna dari perspektif subjek yang diteliti, dengan teori-teori yang digunakan sebagai pedoman agar penelitian tetap fokus pada data lapangan serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang masalah, yang data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen dari berbagai sumber relevan seperti buku, artikel, jurnal, berita, dan literatur lainnya mengenai peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yang kemudian dianalisis untuk memahami ketidakefektifan kedua lembaga tersebut dalam memerangi korupsi di daerah. (Rahmat, 2015)

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **Tingkat Kapabilitas APIP di Indonesia**

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Indonesia menunjukkan tren perbaikan, meskipun sebagian besar instansi masih berada pada level rendah berdasarkan Internal Audit Capability Model (IA-CM). Berdasarkan data dari (Masdan et al., 2017), sekitar 63,38% APIP berada di Level 2, yang menunjukkan pengawasan internal yang belum efektif dalam mencegah korupsi. Hanya 20,54% instansi yang telah mencapai Level 3, sedangkan sisanya masih berada di Level 1 (15,92%), mencerminkan kemampuan yang sangat terbatas dalam pengawasan keuangan.

BPKP sebagai pembina APIP telah melakukan upaya pembinaan yang intensif, seperti di Aceh, di mana 67% APIP berhasil meningkatkan kapabilitas mereka ke level yang lebih tinggi melalui pelatihan dan pembinaan terstruktur. Namun, secara nasional, tantangan berupa kurangnya jumlah auditor dan keterbatasan kompetensi tetap menjadi penghambat utama.

### **Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas APIP**

#### **1. Kompetensi Auditor**

Kompetensi auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kapabilitas APIP. Menurut (Wua et al., 2020), auditor dengan sertifikasi profesional dan pelatihan berkelanjutan dapat mendeteksi risiko lebih dini dan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan teknis, dan sikap profesional. Kompetensi auditor berpengaruh positif secara signifikan terhadap kapabilitas APIP, termasuk dalam deteksi risiko korupsi dan peningkatan kualitas audit.

#### **2. Pengalaman Audit**

Menurut (Dewi & Setyohadi, 2019), pengalaman kerja auditor berdampak pada kemampuan mereka dalam menghasilkan laporan audit yang akurat. Auditor dengan pengalaman lebih luas dapat lebih baik dalam mengelola informasi dan mengambil keputusan yang tepat selama proses audit. Selain itu, pengalaman auditor dalam menangani berbagai jenis pengawasan keuangan negara juga memperbaiki akurasi dan ketepatan dalam identifikasi risiko yang terkait dengan pengelolaan anggaran negara.

#### **3. Dukungan Manajemen dan Sinergi Lintas Lembaga**

Dukungan manajemen sangat penting untuk menunjang kapabilitas APIP. Menurut (Sumanti, 2020), dukungan berupa kebijakan, anggaran, dan fasilitas dapat meningkatkan

efektivitas audit. Namun, dukungan yang berlebihan tanpa kontrol ketat dapat mengurangi independensi auditor. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga seperti KPK, BPK, dan APH untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih menyeluruh dan mengurangi risiko korupsi. Sinergi lintas lembaga memungkinkan penanganan kasus korupsi yang lebih efektif, terutama dalam sektor pengadaan dan alokasi anggaran.

### **Kematangan Organisasi Audit Internal.**

Auditor internal harus mempertimbangkan ekspektasi pemangku kepentingan terhadap efektivitas fungsi audit internal dalam struktur governance perusahaan. Oleh karena itu auditor harus mengurangi risiko yang berkenaan dengan pemberian jasa audit internalnya baik yang berkaitan dengan manajemen fungsi audit internal maupun keterlibatan individu auditor.

Kepala bagian audit internal harus membangun organisasi fungsi audit internal yang kuat agar jasa audit yang diberikannya efektif dan efisien. Organisasi bagian audit internal lebih dominan dipandang sebagai sekumpulan orang yang terampil dan ahli yang siap memberikan layanan audit dengan dukungan sumber daya yang ada dan batasan organisasional yang mengikat. Oleh karena itu, keberhasilan fungsi audit internal salah satunya ditentukan oleh kualitas auditor, dan bagaimana sumber daya manusia (auditor) tersebut dikelola dalam suatu tim untuk setiap penugasan audit.

Aspek kualitas auditor baik secara individual maupun organisasional akan mempengaruhi kematangan organisasi bagian audit internal seperti yang umum

terdapat dalam maturity model. Pitt (2014) mengemukakan tingkat kematangan organisasi bagian/unit audit internal berdasarkan maturity models, yaitu sebagai berikut :

1. Foundation, dimana standar audit belum ditetapkan, aktivitas audit tidak rutin, dan tidak profesional, staf auditor tidak kompeten.
2. Emerging, dimana standar audit ditetapkan tetapi kurang dipatuhi, aktivitas audit dilakukan secara rutin dan profesional baik ad hoc ataupun individual, dan beberapa staf audit memiliki kualifikasi dan atau pengalaman, tetapi tidak secara kolektif.
3. Established, dimana aktivitas audit secara profesional sesuai dengan standar audit yang ditetapkan, dan staf auditor secara kolektif memiliki keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya.
4. Embedded, dimana aktivitas audit baik jasa penjaminan maupun jasa konsultasi memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, dan fokus kepada prioritas strategis, serta pengembangan staf auditor dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
5. Leading, dimana aktivitas audit merupakan layanan unggulan dengan memanfaatkan proses dan teknologi mutakhir, serta secara kolektif staf auditor sangat ahli dan berpengalaman.

Secara spesifik, kematangan organisasi audit internal pada sektor publik ditetapkan berdasarkan kapasitas, kewenangan dan tanggungjawab, serta kompetensi auditor internal, yang dikenal dengan istilah kapabilitas APIP. BPKP (2015) menetapkan lima level kapabilitas APIP, yaitu :

1. Level-1 : Initial, dengan ciri belum ada praktek pengawasan yang bersifat tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan masih tergantung kepada

kinerja individu, sehingga APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi.

2. Level-2 : Infrastructure, dengan ciri proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, serta sudah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, outcome-nya mampu memberikan keyakinan yang memadai, proses sesuai dengan peraturan, dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.
3. Level-3 : Integrated, dengan ciri praktek profesional audit internal telah ditetapkan secara seragam dan selaras dengan standar, dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern, dimana outcome-nya mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan suatu program atau kegiatan,
4. Level-4 : Managed, dengan ciri unit audit internal telah mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko, dimana outcome-nya mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
5. Level-5 : Optimizing, dengan ciri unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan, dimana APIP menjadi agen perubahan.

Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan APIP mengacu kepada enam elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP, yaitu peran dan layanan,

pengelolaan sumber daya manusia, praktek profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, dan struktur tata kelola (BPKP, 2015).

Kematangan organisasi audit internal merupakan aspek penting dalam menentukan tingkat peranan fungsi audit internal dalam mencegah, mendeteksi bahkan menginvestigasi fraud. Keberhasilan pemberian jasa penjaminan (*assurance*) atau konsultasi (*consulting*) ditentukan oleh kapabilitas auditor internal baik secara individual maupun organisasional.

Organisasi audit internal harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yang merupakan bagian integral dari *governance* organisasi secara keseluruhan. Dalam hal ini visi, misi, tujuan dan strategi yang dibangun oleh organisasi audit internal harus mempertimbangkan ekspektasi para pemangku kepentingan dan selaras dengan tujuan strategis organisasi pemerintahan, serta praktek profesional audit internal dilandasi dengan integritas yang tinggi sesuai standar audit dan nilai etika yang berlaku serta mendahulukan kepentingan publik.

Semakin baik tingkat kematangan organisasi audit internal yang dicirikan dengan adanya *good governance* organisasi audit internal, auditor internal yang kompeten dan independen, dan dukungan sumber daya yang memadai, maka peran audit internal akan semakin strategis sebagai mitra manajemen dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi pemerintahan, dengan cara mengevaluasi efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses *governance*, termasuk dalam upaya untuk mencegah, mendeteksi bahkan menginvestigasi korupsi dan tindak kecurangan lainnya.

Peran audit internal yang dimaksud di atas dapat terealisasi bila ada komitmen dan dukungan nyata dari manajemen senior untuk memperkuat organisasi audit internalnya dengan melaksanakan

ketentuan peraturan dan regulasi terkait fungsi audit internal, menempatkan orang yang kompeten dan berintegritas, mengembangkan dan membina sumber daya manusia (auditor) secara berkelanjutan, dan menyediakan sumber daya pendukung yang memadai.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Karagiorgos et al (2010) yang menyimpulkan perlunya manajemen senior memperkuat posisi audit internal untuk mendukung tercapainya fungsi audit internal yang efektif. Hasil studi lain yang dilakukan oleh Jusair dkk (2017) mengungkapkan bahwa kurangnya komitmen dari pimpinan dalam memperkuat Satuan Pengawasan Internal merupakan faktor penyebab tidak efektifnya peran Satuan Pengawasan Internal tersebut.

### **Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan**

Teknologi seperti Continuous Auditing (CA) sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Menurut (Stiawan & Wati, 2022), teknologi audit dapat mendeteksi anomali secara real-time dan mempercepat proses pemeriksaan. Namun, penerapan teknologi ini masih terkendala oleh kurangnya pelatihan teknis dan infrastruktur yang memadai. Penggunaan teknologi audit modern memiliki potensi besar, tetapi keterbatasan infrastruktur masih menjadi penghambat utama.

### **Tantangan yang Dihadapi APIP**

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia  
Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan jumlah auditor yang terlatih dan berkualitas. Banyak auditor yang tidak memiliki sertifikasi profesional, yang menyebabkan kualitas audit yang dilakukan kurang optimal. Hal ini menghambat

efektivitas pengawasan di sektor publik.

Resistensi terhadap Teknologi Banyak auditor yang belum sepenuhnya siap untuk mengadopsi teknologi Continuous Auditing (CA) atau e-audit yang dapat membantu mempercepat deteksi anomali. Resistensi terhadap perubahan teknologi ini merupakan salah satu tantangan besar dalam meningkatkan kapabilitas APIP. (Mahsyar et al., 2019) mencatat bahwa meskipun teknologi memiliki potensi besar untuk memperbaiki pengawasan, banyak auditor yang enggan mengadopsinya karena keterbatasan kompetensi teknis dan infrastruktur yang ada.

2. Kurangnya Internalisasi Kebijakan Beberapa instansi pemerintah belum sepenuhnya menginternalisasi kebijakan pengawasan internal ke dalam operasional mereka, yang menyebabkan audit internal tidak berjalan optimal. Ketidakefektifan ini membuat peluang untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Kurangnya integrasi kebijakan pengawasan internal dalam operasional pemerintah daerah mengurangi efektivitas pengawasan APIP

### **Sinergi dengan Lembaga Lain**

Sinergi antara APIP, BPKP, dan Aparat Penegak Hukum (APH) sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi. Kolaborasi ini dapat memperkuat pengawasan terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa, yang sering kali menjadi sumber utama korupsi di sektor publik. (Masdan et al., 2017) menyoroti bahwa penguatan kolaborasi antar lembaga pengawasan dapat mengurangi celah yang ada dalam sistem pengawasan dan meningkatkan deteksi korupsi secara lebih efisien. Kolaborasi lintas lembaga seperti BPKP dan APIP sangat penting untuk memperkuat pengawasan, khususnya di sektor pengadaan yang rentan terhadap korupsi.

### **Manfaat dan Keterbatasan**

Penelitian yang berfokus pada penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan penerapan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan berbagai manfaat penting sekaligus keterbatasan yang perlu diperhatikan. Dalam konteks penguatan Unit Pengawasan Internal (UPI) di Ombudsman Republik Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan kapabilitas APIP ke level 3 memberikan dampak signifikan pada efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Dengan tercapainya level 3, APIP mampu memberikan nilai tambah melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kehematan operasional lembaga serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Hal ini sejalan dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menargetkan peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi di Indonesia (Bagus et al., 2021).

Selain itu, hasil penelitian terkait maturitas SPIP pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa tingkat maturitas yang lebih tinggi memberikan peluang yang lebih besar untuk memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Temuan ini relevan dengan hasil penelitian (Ageng & Usman, 2023) dan (Suprianto, 2018) yang menyatakan bahwa baik kapabilitas APIP maupun maturitas SPIP memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dukungan teori Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Struktur Unit

Pengawasan Internal yang masih dalam tahap transisi mengakibatkan sejumlah kegiatan, seperti pengembangan kompetensi dan sistem informasi, belum sepenuhnya dikelola secara mandiri. Keterbatasan ini sejalan dengan temuan (Marlaini et al., 2019), yang mencatat bahwa tantangan utama dalam meningkatkan kapabilitas APIP meliputi kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, independensi yang belum optimal, serta alokasi anggaran yang masih terbatas. Selain itu, penelitian hanya menggali persepsi dari pihak internal APIP tanpa melibatkan pandangan auditi atau manajemen organisasi sebagai pengguna layanan. Hal ini serupa dengan kritik dalam penelitian (Fadila & Rahadian, 2019), yang menyoroti pentingnya melibatkan lebih banyak pihak untuk evaluasi yang komprehensif.

Lingkup penelitian yang terbatas pada satu lembaga, seperti Ombudsman RI atau pemerintah daerah tertentu, juga menjadi kendala dalam menggeneralisasi hasilnya untuk institusi lain dengan karakteristik berbeda. Terakhir, data historis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup periode yang relatif pendek (2016-2018 untuk Ombudsman RI dan 2020-2021 untuk pemerintah daerah), sehingga kurang memberikan gambaran tren jangka panjang dari implementasi kebijakan tersebut.

Meski memiliki keterbatasan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara penguatan internal auditor dan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Hasilnya dapat menjadi dasar untuk evaluasi kebijakan di lembaga lain, baik pada tingkat daerah maupun nasional, dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi publik.

#### **4. Simpulan dan Saran**

Korupsi tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, dengan dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memainkan peran strategis sebagai pengawas internal untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di sektor publik. Namun, efektivitas peran APIP masih dibatasi oleh beberapa kendala, seperti kurangnya independensi, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, dan minimnya dukungan manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas APIP melalui pelatihan, sertifikasi profesional, dan penguatan kelembagaan dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih tinggi juga terbukti meningkatkan peluang pemerintah daerah untuk memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menjadi indikator penting dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel. Selain itu, kolaborasi antar lembaga, seperti BPKP, KPK, dan aparat penegak hukum, menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi. Pemanfaatan teknologi modern, seperti e-audit dan continuous auditing, dapat mempercepat deteksi anomali dan meningkatkan efisiensi pengawasan. Namun, tantangan seperti resistensi terhadap teknologi, kurangnya internalisasi kebijakan, dan keterbatasan jumlah auditor profesional masih menghambat optimalisasi peran APIP.

Oleh karena itu, strategi penguatan kelembagaan yang berfokus pada integrasi teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi lintas lembaga sangat diperlukan untuk mendukung reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih terarah, APIP diharapkan mampu memainkan perannya secara maksimal

dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

### DaftarPustaka

- Ageng, Y. R., & Usman, F. (2023). Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Opini Audit. *Jurnalku*, 3(4), 390–401. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.597>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan – BPKP 2015. Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Perka BPKP NO 16 Tahun 2015 berikut Lampiran I – IV.
- Bagus, I., Girindra, R., & Malik, M. (2021). Evaluasi Penguatan Kapabilitas Internal Auditor Pada Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 501–512. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i3.31001>
- Dewi, M. I. A. P., & Setyohadi, S. (2019). Pengaruh Independensi , Kompetensi dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas audit Program Studi Pendidikan Ekonomi , Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial , Universitas Indraprasta PGRI Email : maria.adhisti1206@gmail.com. *Sosio E-Kons*, 11(1), 37–45.
- Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (2021). the Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *The New Economic Sociology: A Reader, January 1983*, 111–134. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Fadila, A., & Rahadian, Y. (2019). Usulan Rancangan Perumusan Opini Audit Internal Pada Kegiatan Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 389–406. <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i2.17241>
- Jusbair Baheri, dan Sudarmanto, dan Ismail Suardi Wekke. 2017. The Effect of Management Support to Effectiveness of Internal Audit for Public Universities. *Journal of Engineering and Applied Sciences* Vo, 12 no 7 2017 hal 1696 – 1700.
- Karagiorgos, Theofanis, and George Drogolas, and Evaggelos Gotzamanis, and Ioannis Tampakoudis. 2010. Internal Auditing as an Effective Tool fo Corporate Governnace. *Journal of Business Management – JBM* Vo, 2 No 1 2010 hal 15 – 23.
- Mahsyar, A., Malik, I., & Makassar, U. M. (2019). *Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Di. 1*, 49–56.
- Marlaini, M., Aliamin, A., & Indriani, M. (2019). Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat Di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10926>
- Masdan, S. R., Ilat, V., & Pontoh, W. (2017). Analisis Kendala-kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”*8(2), 150–159. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17780>
- Pitt, Sally-Anne. 2014. Internal Audit Quality ; Developing Quality Assuranceand Improvement Program. Jhon Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.
- Stiawan, S. P. A., & Wati, N. W. A. E.

(2022). Pengaruh Independensi, Audit Tenure, Skeptisisme Profesional Dan Beban Kerja Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 11–27. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2280>

Sumanti, R. (2020). Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Aceh Melalui Internal Audit Capability Model (IACM). *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 137–158. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.654>

Wua, H. W. M., Saerang, D. P. E., & Gamaliel, H. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Level Kapabilitas Berdasarkan Standar Internal Audit Capability Model (IA-CM) pada APIP Provinsi Sulawesi Utara (Studi pada Inspektorat Kota Manado dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 11(1), 59–67.